PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

# Rencana Kerja
# (RENJA)

Tahun 2024

# KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah merupakan dokumen perencanaan yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 disusun berpedoman pada Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, Pagu Indikatif dan sumbernya serta prakiraan maju Tahun 2025 berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024. Disamping menyajikan data perencanaan, Renja Tahun 2024 juga menyajikan kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan dalam mendukung program Pemerintah Daerah.

Tarutung, 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Ir. TONNY LISTON SIMANGUNSONG, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196506131993031002

# DAFTAR ISI


Kata Pengantar ..... i

Daftar Isi ..... ii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.1.1. Pengertian Renja ..... 2

1.1.2. Proses Penyusunan Renja ..... 3

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ..... 4

1.2. Landasan Hukum ..... 4

1.3. Maksud dan Tujuan ..... 5

1.4. Sistematika Penulisan ..... 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 ..... 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara ..... 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 19

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ..... 20

BAB III PENUTUP ..... 28

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

i. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang menguraikan visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan.
ii. Renja merupakan dokumen dasar penyusunan program kegiatan OPD/Perangkat Daerah kedalam KUA dan PPAS serta penyusunan dan perencanaan program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
iii. Renja Perangkat Daerah juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2024.

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik, salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, *dan* Evalusi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara menyusun Dokumen Renja 2024.

### 1.1.1.Pengertian Renja

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah – langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

### 1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian P–Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan Renja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS Tahun 2024 yang memuat arah kebijakan Pemerintah dalam satu tahun. Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah :

Gambar 1.1.2.1

Alur Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

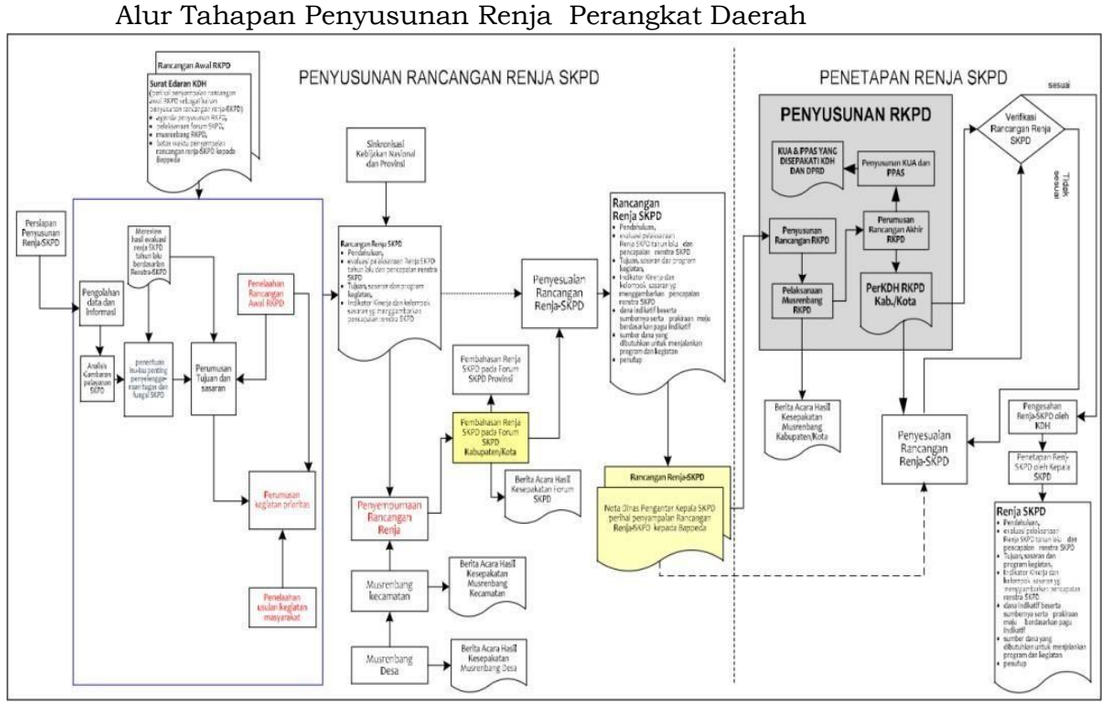

### 1.1.3.Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

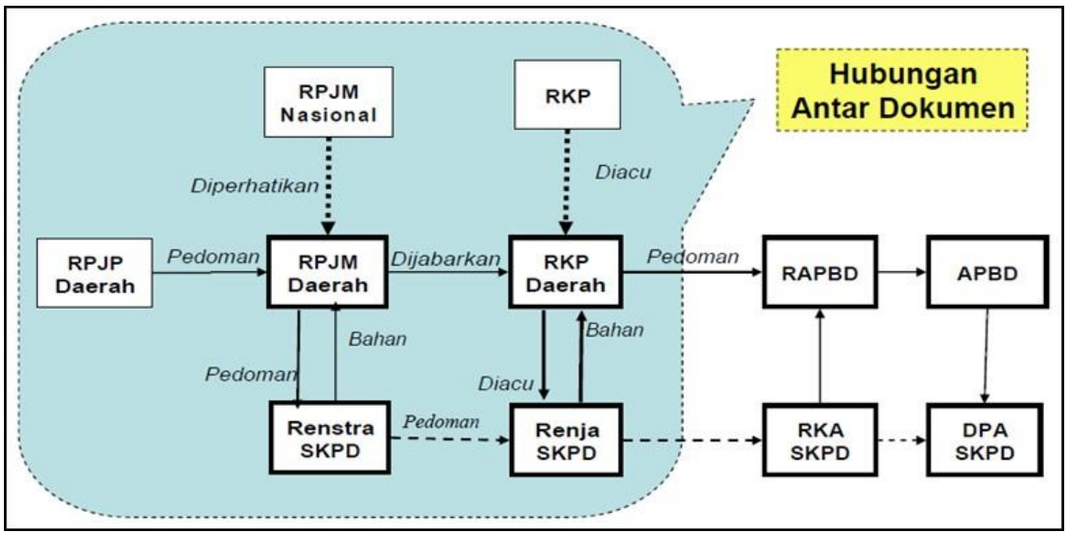


Gambar 1.1.3.1

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara yaitu :

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Keqa Pemerintah Daerah:
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021;
8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
10) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara adalah untuk memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya manusia dan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis dalam tatanan masyarakat yang beragama, beradab, berakhlak dan makmur dalam kurun waktu satu tahun dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

## 1.4. Sistematika Penulisan

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 3 (tiga) bab dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II : EVALUASI RENJA TAHUN 2023**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III : PENUTUP**

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
# TAHUN 2023

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan melalui analisa capaian program. Evaluasi dilakukan dengan menghitung realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja yang dievaluasi dan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renja yang dievaluasi (%). Realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja yang dievaluasi dilihat dari realisasi kinerja pada Tahun 2023. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renja yang dievaluasi (%) dihitung dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dan anggaran dengan target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2024 yang dievaluasi dalam satuan persentase atau dengan notasi (tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renja yang dievaluasi = realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja yang dievaluasi/target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2024 yang dievaluasi) x 100.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, meliputi :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2023 target kinerjanya tercapai 96,48 % dan dilaksanakan hampir sesuai dengan Rencana Anggaran Kas yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
   1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
      - Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

-

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada Tahun 2023, target kinerjanya tercapai sebanyak 99,18 %, karena merupakan salah satu indikator utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara.

c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
   - Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Program Penguatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik pada Tahun 2023, target kinerjanya hanya mencapai 3,8%, hal ini dikarenakan adanya dana Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tidak bisa dicairkan pada Tahun 2023.

d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sampai pada Tahun 2023 mencapai target realisasi 98,46%.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial pada Tahun 2023 mencapai realisasi 98,6 %.

## Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

**PERANGKAT DAERAH : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara**

| No. | Uraian | Anggaran Rp. | Realisasi Rp. | Persen (%) | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **2.975.585.036** | **2.870.964.827** | **96,48** | **APBD** |
| *1.1.* | *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *29.050.000* | *29.045.900* | *99,99* | |
| 1.1.1 | Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.500.000 | 2.500.000 | 100 | |
| 1.1.2 | Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2.500.000 | 2.499.000 | 99,96 | |
| 1.1.3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.000.000 | 4.000.000 | 100 | |
| 1.1.4 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.050.000 | 20.046.000 | 99,98 | |
| *1.2* | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *2.587.226.936* | *2.573.311.019* | *99,46* | |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.538.471.736 | 2.524.555.819 | 97,58 | |
| 1.2.2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | 44.755.200 | 44.755.200 | 100 | |
| 1.2.3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.000.000 | 4.000.000 | 100 | |
| *1.3* | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *211.558.000* | *210.255.808* | *99,38* | |
| 1.3.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.769.600 | 5.737.650 | 99,45 | |
| 1.3.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 17.818.000 | 16.638.250 | 93,38 | |
| 1.3.3 | Penyediaan Peralatan Rumah tangga | 8.126.200 | 8.114.600 | 99,86 | |
| 1.3.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.171.200 | 12.171.100 | 99,99 | |
| 1.3.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 7.748.000 | 7.748.000 | 100 | |
| 1.3.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 159.925.000 | 159.846.208 | 99,95 | |
| *1.4* | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | *16.320.000* | *16.295.000* | 99,84 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 16.320.000 | 16.295.000 | 99,85 | |
| *1.5* | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *86.555.000* | *85.893.119* | *99,23* | |
| 1.5.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.200.000 | 4.200.000 | 100 | |
| 1.5.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 27.858.200 | 27.196.319 | 97,73 | |
| 1.5.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.496.800 | 54.496.800 | 100 | |
| *1.6* | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *44.875.100* | *42.057.100* | *93,72* | |
| 1.6.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan | 28.262.800 | 25.583.400 | 90,52 | |
| 1.6.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 9.110.700 | 9.087.500 | 99,74 | |
| 1.6.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 7.501.600 | 7.431.200 | 99,06 | |
| **2** | **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **917.372.900** | **909.914.750** | **99,18** | **APBD** |
| *2.1* | *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Karakter Kebangsaan* | *917.372.900* | *909.914.750* | *99,18* | |
| 2.1.1 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 100.000.000 | 100.000.000 | 100 | |
| 2.1.2 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 597.975.700 | 591.902.550 | 98,98 | |
| 2.1.3 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 219.397.200 | 218.012.200 | 99,36 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik** | **22.661.833.663** | **871.239.063** | **3,8** | **APBD** |
| *3.1* | *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan* | *22.661.833.663* | *871.239.063* | 3,8 | |
| 3.1.1 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 22.661.833.663 | 871.239.063 | 3,8 | |
| **4** | **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | **31.539.200** | **31.054.350** | **98,46** | **APBD** |
| *4.1* | *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan* | *31.539.200* | *31.054.350* | *98,46* | |
| 4.1.1 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 31.539.200 | 31.054.350 | 98,46 | |
| **5** | **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** | **465.303.500** | **458.804.100** | **98,6** | **APBD** |
| *5.1* | *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial* | *465.303.500* | *458.804.100* | *98,6* | |
| 5.1.1 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 119.050.000 | 112.812.150 | 94,76 | |
| 5.1.2 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan | 66.479.800 | 66.295.650 | 99,72 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | |
| 5.1.3 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 279.773.700 | 279.732.300 | 99,98 | |
| | Total Anggaran 2023 ..... | 27.051.634.299 | 5.227.915.209 | 19,33 | APBD |

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara yang telah tertuang dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020–2024.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data – data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.

**PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPANULI UTARA**

| Kode | | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan sesuai DPA 2023 | Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Renja 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Kinerja | Anggaran |
| *1* | | | | | | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **8** | **01** | **01** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | |
| **8** | **01** | **01** | **2.01** | | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 kegiatan | 2.540.000 |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersusunnya Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 kegiatan | 2.540.000 |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 kegiatan | 4.000.000 |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 bulan | 21.840.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **01** | **01** | **2.02** | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Cakupan layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 100% | 2.792.245.611 |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Meningkatnya Kinerja Aparatur | 12 bulan | 51.703.200 |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 kegiatan | 4.000.000 |
| **8** | **01** | **01** | **2.06** | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya biaya untuk Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 12 bulan | 3.768.900 |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 12 bulan | 25.246.600 |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 12 bulan | 5.120.000 |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya biaya cetakan dan penggandaan | 12 bulan | 5.968.500 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan | 123.445.000 |
| **8** | **01** | **01** | **2.07** | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2 unit | 15.787.200 |
| **8** | **01** | **01** | **2.08** | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 bulan | 2.000.000 |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan | 27.630.000 |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | 54.604.764 |
| **8** | **01** | **01** | **2.09** | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan | Terawatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas | 12 bulan | 19.769.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | atau Kenderaan Dinas Jabatan | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 bulan | 5.033.700 |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terawatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 12 bulan | 4.970.300 |
| **8** | **01** | **02** | | | | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | | | |
| **8** | **01** | **02** | **2.01** | | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | Terlaksananya perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Terlaksananya perumusan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 100% | 300.000.000 |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Terlaksananya perumusan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 100% | 166.865.600 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **01** | **03** | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | Meningkatkan Pendidikan Politik bagi Masyarakat dan fasilitasi Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten | | |
| **8** | **01** | **03** | **2.01** | | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah** | Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah | | |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Terlaksananya penyusunan perumusan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 100% | 55.347.725.563 |
| | | | | | | | | | |
| **8** | **01** | **04** | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | Meningkatkan Pendidikan Politik bagi Masyarakat dan fasilitasi Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **01** | **04** | **2.01** | | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Ormas LSM | | |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | 05 | | Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 100% | 33.135.000 |
| **8** | **01** | **05** | | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA** | Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | |
| **8** | **01** | **05** | **2.01** | | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | |
| | | | | | | | | | |
| **8** | **01** | **06** | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | |
| **8** | **01** | **06** | **2.01** | | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan** | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 04 | | Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 100% | 36.300.000 |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 05 | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah | Terlaksananya pelaksanaan monitoring Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 100% | 63.700.000 |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 06 | | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 276.000.000 |

# BAB III

# PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Sesuai amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menyatakan Rencana Kerja Perubahan PD merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun berikutnya.

Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi PD dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat daerah dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat daerah (PD) dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan. Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Setiap Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra – PD).

Dengan harapan Rencana Kerja (Renja ) Tahun 2024 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara dapat tercapai.

Tarutung, Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Ir. TONNY LISTON SIMANGUNSONG, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196506131993031002